

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmadi, Wiratni. **Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak**. Cetakan kesatu. PT. Refika Aditama. Bandung. 2006.
- Albert Rumokoy, Donald., dan Frans Maramis. **Pengantar Ilmu Hukum**. Cetakan kesatu. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Anjarwati, Ratna. **PPH Final 1% untuk UMKM**. Cetakan pertama. Pustaka Baru Press. Yogyakarta. 2014.
- Brotodihardjo, Santoso. **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**. Cetakan Keduapuluh tiga. PT. Refika Aditama. Bandung. 2013.
- Burton, Richard. **Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan**. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2014.
- Carofin, Fidel. **Kupas Tuntas Kasus Tindak Pidana Perpajakan**. Cetakan kesatu. PT. Carofin Media. Jakarta. 2015.
- Hidayat, Nur. **Corporate Tax Risk Management**. Cetakan Pertama. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2015.
- Mahfud MD. **Politik Hukum Di Indonesia**. Cetakan ke enam. PT. Rajagrafindo Persada. Depok. 2014.
- Mardiasmo. **Perpajakan**. Edisi ke tujuh belas. Andi. Yogyakarta. 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. **Penelitian Hukum**. Cetakan kesepuluh. Prenamedia Group. Jakarta. 2015. hlm 181.
- Muljono, Djoko. **PPH dan PPN untuk Berbagai Kegiatan Usaha**. Edisi Kedua. Andi. Yogyakarta. 2009.
- Priantara, Diaz. **Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak**. Cetakan kedua. PT. Indeks. Jakarta. 2011.
- Rosdiana, Haula., Edi Slamet Irianto., Titi Muswati Putranti. **Teori Pajak Pertambahan Nilai**. Ghalia Indonesia. 2011.
- Sukardji, Untung. **Pajak Pertambahan Nilai**. Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi. Rajagrafindo. Jakarta. 2012.

- . **Pajak Pertambahan Nilai**. Cetakan Kesepuluh. Edisi revisi. Rajagrafindo. Jakarta. 2014.
- Widodo, Widi. **Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak**. Cetakan kesatu. Alfabeta. Bandung. 2010.
- Yani, Ahmad. **Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai**. Cetakan Pertama. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2006.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Abdurachman adimihardja. “**Strategi mempertahankan multifungsi pertanian di Indonesia**”. Jurnal Litbang Pertanian, Vol 25, No 3, 2006, hlm 99 – 105.
- Arfan Faiz Muhlizi, “**Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi**”, Jurnal Rechts Vinding, Vol 1, No 1, April 2012, hlm 93 – 111
- Ridwan, “**Diskresi (Freies Ermessen) Oleh Pejabat Pemerintah Rambu Hukum, Alat Ukur Keabsahan dan Kecermatan Penggunaannya**”, Jurnal Media Hukum, Vol 6, No 3, Desember 2009, hlm 439 – 450

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. **Susunan Undang-undang Dalam Satu Naskah**. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta. 2011.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/ PMK.03/ 2013 tentang *Batasan Pengusaha Kecil*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang *Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 tentang *Pencabutan Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan*.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tentang *Pelaksanaan putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 70P/HUM/2013 mengenai pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan*

*kehutanan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2007.*

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang *Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme*

Peraturan Menteri Pertanian nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang *Pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 144 tahun 2000 tentang *Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai*

### **Website**

Beritasatu.com, “**Jokowi Sampaikan Visi Misi Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sawah**”, <http://www.beritasatu.com/nasional/180468-jokowi-sampaikan-visi-misi-pertanian-dan-ketahanan-pangan-di-sawah.html>, diakses pada tanggal 24 Januari 2016.

Intan Pritasari. “**Kelayakan Negara Indonesia sebagai Negara Agraris**”. <http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.co.id/2013/12/kelayakan-negara-indonesia-sebagai.html>. diakses pada tanggal 24 Januari 2016.

Kompas.com. “**Wamendag: Produk Pertanian Segar Tidak Seharusnya Dikenai PPN**”. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/15/190400626/Wamendag.Produk.Pertanian.Segar.Tidak.Seharusnya.Dikenai.PPN>. diakses pada tanggal 24 Januari 2016.